

HEGEMONI KEKUASAAN DALAM WACANA KONSEPTUALISASI OBJEK TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Natal P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

natal7tg@yahoo.com

ABSTRAK

Tata naskah dinas adalah satu bentuk wacana produk hukum yang mengatur penulisan naskah kedinasan di lingkungan pemerintah di antaranya pemerintah daerah. Dalam penyuntingannya, adakalanya bahasa wacana itu sulit diperbaiki jika diarahkan kepada gramatika yang ideal. Alasan yang ditemukan untuk itu cukup absurd, yakni akan adanya penolakan atau tidak ditanggapinya konsep surat yang diajukan. Tampaknya, ada ideologi tertentu yang berpengaruh di sana. Dalam kajian teori kritis, pengaruh seperti itu tampak merupakan bagian dari topik hegemoni. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menggali realitas hegemoni itu melalui ancangan analisis wacana (kritis). Data penelitian ini diambil dari Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Data dibatasi pada bagian Ketentuan Umum yang memuat sejumlah konseptualisasi objek nota dinas. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori kritis sejumlah ahli di antaranya, Michel Foucault, Norman Fairclough, dan Habermas. Alasan utamanya adalah bahwa teori kritik yang mereka ajukan mempunyai kesamaan dalam melihat bahasa sebagai wacana. Mereka sepakat bahwa bahasa adalah salah satu penanda praktik sosial yang memuat identitas, relasi sosial, dan sistem pengetahuan, serta keyakinan. Selain itu bahasa diakui memiliki fungsi ideasional dan interpersonal. Secara ideasional bahasa digunakan untuk membuat sistem pengetahuan. Sementara itu, secara interpersonal, konstruksi bahasa dibuat untuk menciptakan subjek-subjek dan identitas tertentu dalam menjalankan relasi satu sama lain. Foucault secara khusus menyatakan bahwa di dalam wacana terdapat relasi antara kuasa dan pengetahuan. Gagasan-gagasan itu pula yang cenderung tersembunyi dalam konseptualisasi objek naskah dinas. Data penelitian ini dianalisis dengan teknik rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap konsep pada tataran struktur teks (mikroteks) untuk melihat pilahan unsur dalam bentuk subjek dan indentitas yang termaktub dalam konsep. Kewacanaan unsur itu dideskripsikan berdasarkan relasi antara fungsi dan identitasnya. Kemudian, posisi antarfungsi diuji dengan teknik perbandingan dan pembalikan unsur untuk melihat keberterimaannya secara semantik dan secara pragmatik (mesoteks dan makroteks). Dari analisis terlihat adanya 3 maujud konstruksi: 2 konstruksi yang relatif sistematis dan 1 yang relatif tidak sistematis. Dua konstruksi yang dimaksud mempunyai pola objek + verba kopula + konsep definisi (klausa tematik x dan y) masing-masing dapat diberik karakteristik direksional dan nondireksional. Sementara itu, konstruksi yang relative kurang jelas itu adalah bentuk tidak konsisten terhadap ciri konseptualnya. Kecenderungan yang terlihat ialah jika konsepnya bersifat direksional, strukturnya akan lebih mengedepankan klausa teks Sumber (pola SI) daripada klausa teks Isi (pola IS); sedangkan jika konsepnya bersifat nondireksional, strukturnya lebih mengedepankan klausa teks Isi (pola IS) daripada klausa teks Sumber (pola SI), tetapi tidak terlalu ketat. Pada struktur dan ciri SI itulah tersimpan pengetahuan yang absurd sekaligus menyebabkan ketidakkuasaan kelompok sosial tertentu untuk mengikuti bentuk tuturan (yang dianggap) ideal. Hal itu pula yang menjadi titik tolak pengaturan yang baku dan sistematis perihal pemosisian hegemoni dan kekuasaan dalam konsep objek naskah dinas.

Kata kunci: hegemoni, kekuasaan, naskah dinas, wacana kritis

ABSTRACT

An official document guideline is a form of legal product discourse that regulates the writing of official documents in the government office, including local governments. In the process of editing, sometimes the language of discourse is difficult to improve if it is directed to the ideal grammar. The reason behind it is quite absurd. It is said that there will be a rejection or no response to the concept of the submitted letters. Apparently, there is a certain ideology that is influential in them. In the study of critical theory, such influence appears to be a part of hegemony topics. For this reason, this research is aimed at exploring the reality of hegemony through a (critical) discourse analysis approach. This research data was taken from The Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 54 the Year 2009 concerning The Guideline of Official Documents in Local Government Offices. The data is limited to the General Provisions section which contains several conceptualizations of the object of an official memorandum. The theory that will be used in this research refers to the critical theory written by a number of experts such as Michel Foucault, Norman Fairclough, and Habermas. These theories are used because they have in common in seeing language as discourse. The writers of the theories agree that language is one of the markers of social practice that includes identity, social relations, knowledge systems, as well as beliefs. In addition, language is recognized to have ideational and interpersonal functions. Ideationally, language is used to create knowledge systems. Meanwhile, interpersonally, language construction is made to create certain subjects and identities in carrying out relations with each other. Foucault specifically states that in discourse there is a relationship between power and knowledge. These ideas also tend to be hidden in the conceptualization of official document objects. The

data of this research were analysed by reconstructing and deconstructing the concepts at the level of the text structure (microtext) to see the elements in the form of subjects and identities contained in the concept. The discourse of the element is described based on the relationship between function and identity. Then, the inter-function position was tested by comparison and inversion of elements to see their acceptability semantically and pragmatically (mesotext and macrotext). From the analysis, it can be seen that there are 3 forms of construction: 2 relatively systematic constructions and 1 relatively unsystematic construction. The two constructions have the following pattern: object + copula verb + definition concept (thematic clauses x and y), each of which can be given directional and non-directional characteristics. Meanwhile, the relatively unsystematic construction has pattern that is inconsistent with its conceptual characteristics. The tendency that can be seen is that if the concept is directional, the structure will prioritize the Source text clause (SI pattern) rather than the Content text clause (IS pattern); whereas if the concept is non-directional, the structure prioritizes the Content text clauses (IS pattern) rather than the Source text clauses (SI pattern), but these patterns are not too strict. It is in the structure and characteristics of the SI that absurd knowledge is stored as well as causing the powerlessness of certain social groups to follow the (so-called) ideal form of speech. This reason is also the starting point for standard and systematic arrangements regarding the positioning of hegemony and power in the concept of official document objects.

Keywords: power, hegemony, official documents, critical discourse

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan: (1) ketidakparalelan secara gramatika struktur teks konsep untuk sejumlah objek naskah dinas (OND) pada bagian ketentuan umum Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2009 (*Permendagri*) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan (2) ditemukan ketidaksetujuan oleh sejumlah kalangan khususnya yang terkait dengan naskah dinas dalam hal penyelarasan tersebut. Padahal, keselarasan merupakan salah satu prasyarat komunikasi atau tuturan yang ideal dari perspektif linguistik (lihat Habermas 1970, 1971 dalam Titscher 2009: 236). Tampaknya, keadaan merupakan sesuatu yang tidak kebetulan. Artinya, keadaan itu sangat dimungkinkan oleh adanya unsur tertentu, baik sengaja maupun tidak sengaja atau disadari maupun tidak disadari. Uniknya, bukan konsekuensi logika semantik bahasa yang menjadi alasan penolakan itu, melainkan kepatuhan struktur dalam hierarki kekuasaan. Dokumen ajuan kerap terkendala jika terdapat penyelarasan yang disarankan. Keadaan itu juga tampak dipengaruhi oleh gejala social tertentu, sebagaimana disebutkan oleh Renkema (2004: 282) sebagai *societal problem* yang berhubungan dengan kognisi dan kompetensi linguistik. Bagi Foucault (1962—1984), itu merupakan bentuk keterpenjaraan (massa) dalam hal pemikiran. Bagi Habermas, hal itu menjadi kecacatan ideologi bahkan disebutnya sebagai *patologi sosial* (dalam Goldblatt 2019: 175).

Karena persoalan seperti itu dapat terindikasi dari bentuk penggunaan bahasa, dan cenderung berkuat pada makna sosial (dibandingkan dengan makna semantiknya), pendekatan (*approach*) linguistik yang digunakan untuk meneliksinya dalam penelitian ini adalah **analisis wacana kritis** (*Critical Discourse Analysis* [CDA]). CDA ditujukan untuk melihat permasalahan sosial, terutama dalam hal manipulasi dan pendiskriminasian kelompok marginal (Eades [2001; dalam Mesthrie 2001: 231—233]). CDA dilihat bukan dalam kaitan antara sistem bahasa, melainkan perbedaan dalam penggunaan bahasa. Dalam cakupan yang lebih luas lagi, CDA diartikan juga sebagai kajian perspektif ideologi (Renkema, 2004: 282).

Secara linguistik (kritis), sulitnya berubah dalam bahasa OND dengan alasan yang absurd, sebenarnya tidak menjadi keharusan. Para pihak terkait seyogianya harus diizinkan terbebas dari hal itu. Pengonsepan naskah dinas yang demikian dimungkinkan sebagai bagian dari pengaruh budaya dari kolonialisme Barat zaman dahulu. Apakah memang hal itu yang melatarbelakangi ketidakapikan itu; ataukah hal itu merupakan bentuk signifikansi tanda hegemoni untuk mempertahankan kelas dan kekuasaan? Inilah masalah yang tersembunyi dalam sosialisasi bahasa yang ideal untuk ranah surat atau perundang-undangan. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah rekonstruksi hegemoni yang terdeteksi melalui teks Bahasa dalam konseptualisasi OND?
2. Bagaimanakah realita hegemoni dalam OND jika ditelisik dari sudut pandang teori kritis?

Permasalahan (1), akan ditelisik berdasarkan teori analisis wacana pada tataran mikroteks sebagaimana diajukan oleh Fairclough (2010), yakni pada tataran gramatikal. Permasalahan (2) akan ditelusuri dengan mengaitkan bentuk anomali pada permasalahan (1) dengan konteks di luar struktur, baik secara mesoteks (Fairclough dalam Bakri 2016), maupun makroteks dengan memproyeksikannya dengan sejumlah teks yang relevan dan terkait, yakni dengan teks kritis secara teoretis, dan teks kritis secara nonteoritis. Dengan perkataan lain, penelitian ini bertujuan untuk menemukan rekonstruksi hegemoni dalam bentuk

gramatikal bahasa dan menghubungkannya dengan pemikiran, catatan, atau wacana lain yang lebih besar untuk menunjukkan keuniversalan yang bergelayut dalam permasalahan sosial.

Kerangka Teori dan Kajian Pustaka Terkait

CDA pada dasarnya sudah cukup lama digeluti para ahli bahkan sejak kemunculan teori sosial klasik zaman Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Banyak perdebatan tentang perspektif kritis itu, karena dianggap mengandung bias (Fairclough 1995: 6). Akan tetapi, CDA diakui pula dapat membantu pemahaman sejumlah pihak tentang permasalahan sosial. Renkema (2004:282) menyebutkan bahwa CDA dapat memberi semangat (*empowering*) perjuangan (*struggling*; lihat Fairclough *ibid*: 1) bagi kelompok sosial yang *powerless*. Selain itu, CDA juga dipandang sebagai bentuk aksi sosial atau tindak politik. Namun, semua sisi itu tentu selalu terbuka untuk kritik selanjutnya.

Pada era modern, masalah sosial dengan memandang objek sebagai wacana jamak dibicarakan, tentu dengan berbagai corak dan metodologi, di antaranya Karl Marx (1818—1883), Antonio Gramsci (1891—1937), Michel Foucault (1926—1984), Jurgen Habermas (1929--1994), dan Norman Fairclough (2013). Teori yang mereka ajukan tampak saling berkaitan dan telah memberi sumbangan pemikiran modern di sejumlah belahan dunia yang kini terbilang maju. Goldblatt (1996, 2019:10) menyatakan bahwa pemikiran kritis adalah *raison d'être* (alasan menjadi) terpenting untuk masuk dalam struktur institusional sekaligus (menjadi) arus penguat yang mendorong perubahan (*change*) masyarakat ke arah berpikir yang lebih modern.

Secara umum, mereka menandai bahwa *hegemoni* adalah suatu gejala tertentu yang muncul dalam kelas-kelas sosial. Sebagai *gejala sosial*, hegemoni dipandang sebagai bagian dari strategi kelompok tertentu yang diciptakan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dan penguasaan. Hegemoni digunakan untuk memengaruhi sikap dan perilaku yang dikuasai. Sebagai bentuk *ideologi*, hegemoni dapat dicapai dengan alat tertentu. Demirovic (1992 dalam Titscher 2009: 237) menyebutkan bahwa salah satu materi (alat) untuk mencapai hal-hal tersebut ialah dengan *tanda linguistik*.

Setelah pengembangan pemikiran klasik, kajian fenomena sosial bertajuk hegemoni pertama sekali dipopulerkan oleh Gramsci. Dia termasuk dalam golongan filsuf ternama abad ke-20 setelah Marx. Pemikirannya merupakan tindak lanjut dari pengembangan teori Marxisme. Akan tetapi, konsep Gramsci banyak terpengaruh oleh pemikiran Hegel (1770—1831). Gramsci mengonsepsikan **hegemoni** sebagai bentuk pendorongan atau pemengaruhan oleh kekuatan tertentu kepada pihak lain terutama dalam kaitan dengan status sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Namun, pemengaruhan itu cenderung tidak seimbang (Fairclough 1995b: 2) bahkan dipelihara untuk tujuan tertentu utamanya kekuasaan.

Marx (1818—1883 dalam Suseno 2015) memotret adanya sekat yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain secara tidak adil. Dalam kaitannya dengan ideologi sosialisnya, ketidakadilan itu terkondisi dan atau disengaja, dikreasi, bahkan dipelihara. Sebagai fenomena sosial, Foucault juga melihat benang merah ketimpangan itu dalam bingkai relasi kekuasaan dan pengetahuan. Foucault pun menggunakan tuturan atau komunikasi (bahasa) sebagai salah satu unsur dalam kajiannya.

Sebagai kajian, teori hegemoni digunakan untuk memotret fenomena yang terjadi atas segala cara yang dilakukan pihak tertentu untuk mengondisikan dan mempertahankan kekuasaan. Teori hegemoni dititikberatkan pada cara dan proses yang dilakukan kelompok tertentu kepada kelompok lain. Persamaannya dengan konsep Marx, hegemoni itu dapat dikonversi ke dalam pertanyaan “bagaimana kelas sosial yang lebih tinggi melakukan hal tertentu terhadap kelas sosial yang dianggap lebih rendah. Dalam praktiknya, Marx melihat kaum-kaum borjuis melakukan pendoktrinan (bahkan pengancaman) kepada kaum proletar atau pekerja agar tetap melakukan produksi. Dalam hal itu, kaum proletar tidak diharapkan menuntut perbaikan hidup (semisal untuk kenaikan kelas dalam hal pendapatan atau status sosial). Dikotomi kekuatan ini mirip juga dengan laporan Eades (dalam Mesthre 2001: 231) yang menyatakan bahwa secara etnografi pun terlihat adanya kesenjangan oleh *powerfull* dengan yang kelompok yang dipandang *powerless*. Untuk penelitian ini, konsep Marx dalam kaitannya dengan konsep hegemoni dikonversi dalam pertanyaan “bagaimana kelas penguasa mengondisikan struktur teks OND agar diketahui dan diterima sebagai kebenaran oleh kelas sosial di bawahnya lalu dipatuhi sampai tidak ada niat untuk mengubahnya.

Ketidakkuasaan untuk *mengubah* atau *berubah* itu menjadi relevan dengan pemikiran Foucault (1926—1984) yang melihat hubungan ke(tidak)kuasaan dengan pengetahuan. Hal itu juga merupakan unsur yang turut menjadi pertimbangan dalam menjelaskan konsep hegemoni dalam penelitian ini. Konsep *pengetahuan* (dengan menggunakan paradigma eksistensialisme) tampak menjadi bandingan yang sepadan dengan *ketidaktahuan*; *kekuasaan* dengan *ketidakkuasaan*, dan *pengetahuan* dengan *ketidaktahuan*. Tentu, ketidakkuasaan untuk mengubah pola konsep itu bisa disebabkan oleh dua hal,

yaitu (1) adanya pengetahuan yang terputus (baik sengaja, maupun tidak sengaja) dari pemilik ide yang pertama (konseptor), dan atau (2) kekuasaan yang awalnya memang secara sengaja dilanjutkan dari waktu ke waktu.

Foucault (1966) dalam tulisannya *The Order of Things* menyebutkan "... dalam beberapa bentuk pengetahuan empiris tertentu ... (ada) ritme transformasi yang tidak berjalan dengan mulus, layaknya skema-skema perkembangan berkelanjutan yang biasanya diterima". Frasa tidak berjalan mulus pada pernyataan itu kemudian disebut sebagai *diskontinuitas*. Seiring dengan itu, di samping adanya diskontinuitas, pasti ada konsep yang terus berlanjut (yang selanjutnya di sini dapat disebut *kontinuitas*).

Marx dikritisi oleh Habermas. Habermas kurang setuju perihal bekerja secara individual dalam hal produksi. Menurutnya interaksi resiprokal juga penting asal didasari oleh kesadaran moral. Dia (dalam Goldblatt, 2019: 180) melihat empat hal yang menyebabkan terjadinya patologi sosial. Kesatu, rasionalitas tidak terlembaga dengan baik sehingga pembelajaran menjadi terlepas dari akar fondasi yang seharusnya. Hal itu juga berakibat pada rasionalitas tidak ditransmisikan dengan baik. Gejala ini sejalan dengan konsep *diskontinuitas* yang dimaksudkan oleh Foucault di atas. Kedua, ada pun pelembagaan dengan pembentukan struktur, dikerjakan juga tidak memadai sehingga efeknya juga tidak maksimal bahkan sangat minimal. Ketiga, ada unsur lain yang memaksa masuk ke ranah pragmatis yang secara epistemologis tidak relevan dengan sistem yang dibuat; dan keempat, pengetahuan khusus terlepas dari tindakan tertentu yang digagas melalui pemikiran para ahli. Berdasarkan hal tersebut, Habermas melihat wacana (kritis) menjadi bagian penting untuk menggagas gerakan sosial yang baru.

Untuk penelidikan makna secara lebih luas, Fairclough (2013) mengusulkan analisis berdasarkan tiga lapis teks yang berkelindan menjadi satu wacana. Lapis teks itu adalah mikroteks, mesoteks, dan makroteks. *Mikroteks* pada dasarnya berada dalam tataran gramatikal, *mesoteks* terkait dengan konteks pragmatik yang melatarbelakangi pembentukan gramatikal, dan *makroteks* terkait dengan teks sosial secara intertekstualitas yang menyangkut sejumlah ideologi. Tampaknya, konsep makroteks dalam analisisnya sepadan dengan konsep intertekstualitas yang disebutkan oleh Wittgenstein (1984, dalam Titscher et al. 2009: 239) yang dapat melibatkan teks yang bersifat historis. Penelitian ini akan mengadopsi kerangka pikir yang diajukan oleh Fairclough ini. Secara intertekstualitas, penelitian ini akan melibatkan beberapa wacana, di antaranya wacana naarasi di balik atau sebelum pengungkapan wacana Nitisarasamuccaya (yang kemudian dikenal dengan *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*) yang dituturkan oleh Uli Kozok pada suatu waktu di Jambi. Selain itu, makroteks dalam kajian ini juga akan melibatkan catatan historis perjalanan seorang wartawan Muhammad Radjab (2020) dengan buku *Catatan di Sumatera*.

METODOLOGI PENELITIAN

Data teks wacana dalam penelitian ini diambil dari naskah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Data teks yang menjadi objek penelitian ialah Bab I *Ketentuan Umum*, Pasal 1 ayat 28—50, dan ayat 55—57. Data tersebut dicatat langsung (mengadopsi model Sudaryanto 1993) dan direduksi sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, data itu diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi (klausa tema) pada konsep makna. Urutan klausa tema tersebut, selanjutnya secara teknis diistilahkan sebagai *tipe data*. Untuk kemudahan pembuatan tipe data, jenis informasi tersebut masing-masing dikodekan dengan huruf kapital berdasarkan huruf pertama (S untuk Sumber dan I untuk kode klausa tema Isi).

Analisis dilakukan dengan mengacu pada tiga lapis teks yang dikemukakan oleh Fairclough, yaitu mikroteks, mesoteks, dan makroteks. Pada tataran mikroteks, analisis data dilakukan dengan pengidentifikasian dan pemetaan berdasarkan tema klausa yang membuat unsur sebagaimana dalam tipe data dalam Tabel 2 (lihat pembahasan). Unsur itu dibandingkan dengan konstruksi konseptualisasi dalam teknik leksikografi dengan mengacu pada struktur teks *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Dalam KBBI, objek surat (misalnya, *surat keterangan* atau *surat kuasa*) dikonseptualisasikan sebagai berikut.



Secara umum, struktur teks konseptual dimulai dari unsur isi (dengan frasa *surat yg berisi*) kemudian dilanjutkan dengan keterangan lain, misalnya, tujuan atau asal. Namun, dalam ranah perundang-undangan struktur dan unsurnya tidak selalu seperti yang di dalam KBBI itu. Selanjutnya susunan klausa tema sebagai pembentuk makna itu diuji secara tekstual dengan teknik pembalikan (lihat Sudaryanto 1993) untuk melihat eksistensi dan keberterimaannya baik secara gramatikal (semantik) maupun pragmatik (jika terdapat gejala yang mengarah kepada anomali, selanjutnya ditandai dengan simbol ?? di awal konstruksi).

Pada tataran mesoteks, gejala anomali konteks sosial akan dikaitkan dengan faktor eksternal (di luar konstruksi teks secara linguistik), yaitu faktor yang diarahkan atau dipersempit kepada beberapa kemungkinan di antaranya ketidaktahuan, permisif, atau kepercayaan yang suka rela (sebagaimana diistilahkan oleh Foucault). Selain itu, mesoteks gejala itu diproyeksikan kepada kecenderungan konstruksi dalam budaya dan sejarah sosial yang lebih luas (sebagaimana disebutkan oleh Habermas), yakni budaya feodalistik dan atau adanya keinginan untuk selalu mempertahankan harga diri atau penghormatan. Pada tataran makroteks, data wacana akan dilihat dalam hubungannya secara intertekstualitas. Pendeskripsian analisis akan dilakukan dengan memanfaatkan kacamata teori kritis terhadap realitas permasalahan sosial secara umum.

PEMBAHASAN

Data teks Permendagri No. 54 Tahun 2009 sebagaimana disebut pada bagian metodologi, ditandai dengan huruf I untuk tema klausa Isi, huruf S untuk tema klausa Sumber dan atau Sasaran, dan huruf T untuk tema klausa Tujuan. Tipe data digolongkan atau dirampatkan ke dalam dua tipe SI (dengan kuantitas 61.5%) dan tipe IS (dengan kuantitas 38.4%). Dari persentase itu tampak bahwa tipe SI merupakan konstruksi yang dominan. Konstruksi inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Pemusatan perhatian pada jenis itu didasarkan pada (i) perbedaannya dengan pola konstruksi yang lazim dalam perkamusan (KBBI) yang bercorak IS; (ii) jumlah yang cukup banyak dan tampak sebagai kelompok yang dominan; dan (iii) konstruksi itulah yang menjadi kaku karena dianggap baku sehingga tidak perlu diubah. Di situ pulalah area utama adanya unsur hegemoni.

Karakteristik dua tipe konstruksi itu dapat kita cermati pada perbandingan percontoh *surat keterangan* berkonstruksi IS dan *surat perintah* berkonstruksi SI pada konstruksi (1) dan (2) berikut (Data lainnya tidak akan diuraikan lagi karena sudah terwakili oleh dua percontoh (1) dan (2)).

- (1) Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- (2) Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Konstruksi teks informasi konseptual dimulai setelah unsur kopula yaitu kata *adalah*. Formula konstruksi keseluruhannya dapat dinotasikan sebagai berikut (kopula *adalah* dinotasikan dengan simbol =).

- (i). $OND = S + I$
- (ii). $OND = I + S$

Konstruksi (1) dengan urutan informasi (*berisi pernyataan... dari pejabat*) pada dasarnya relatif sepadan dengan pola yang terdapat dalam KBBI, kecuali keeksplisitan kopulanya. Selain itu, secara sintaksis posisi unsur relatif dapat dipertukarkan seperti pada (1a) berikut ini.

- (1) Surat keterangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berisi pernyataan tertulis sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

Perubahan konstruksi (1) menjadi (1a) di atas—meskipun berbeda dari pola konseptualisasi KBBI—pada dasarnya tidak menimbulkan anomali baik secara semantik maupun pragmatik. Dalam penelitian ini, jenis konstruksi (1) di atas tidak mengindikasikan adanya gejala apa pun yang patut dicurigai termasuk keberadaan hegemoni tertentu di dalamnya.

Berbeda dari itu, konstruksi (2) secara mikroteks dapat dicermati dengan pengubahannya menjadi seperti (2a) dan (2b) di bawah ini.

- (2a) Surat perintah tugas adalah (??) naskah dinas yang berisi perintah dari atasan yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2b) Surat perintah tugas adalah (??) naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari atasan yang ditujukan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Letak masalah yang menjadi kecurigaan adanya hegemoni adalah ketika bentuknya menjadi (2a) dan atau (2b) di atas. Pada dasarnya, bentuk (2a) dan (2b) di atas tidak menimbulkan anomali semantik. Namun, pada praktiknya bentuk inilah yang justru mendapat penolakan dari pegiat persuratan di daerah. Dalam hal itu, konstruksi (2a) dan (2b) secara pragmatis menjadi kurang berterima (??).

Berdasarkan kecenderungan yang terlihat dalam konsep OND di atas terdapat dua karakteristik yang menjadi kecenderungan. Satu, apabila OND itu bercorak suruhan dari atasan untuk dilaksanakan oleh bawahan, kecenderungan konsepnya akan berpola SI. Dalam penelitian ini karakter yang demikian ditandai dengan istilah *direksional*. Jenis OND yang termasuk dalam karakter ini, selain contoh (2) di atas, adalah penugasan, petunjuk, penguasaan, undangan, panggilan, disposisi, dan sebagainya. Dua, apabila OND tidak bersifat suruhan dari atasan dan bukan sesuatu Tindakan yang bersifat segera untuk dilaksanakan, kecenderungan konsepnya akan berpola IS. Dalam penelitian ini, karakteristik itu ditandai dengan istilah *nondireksional*. Jenis OND yang termasuk dalam karakter ini, selain contoh (1) di atas adalah keterangan biasa, izin, nota dinas, pengajuan konsep, pengantar, dan sebagainya.

Karakteristik lainnya ialah bentuk yang tidak mengikuti kecenderungan itu. Secara teoretis bentuk ini juga anomaly. Anomali seperti itu menjadi karakteristik terpisah dari dua karakter di atas dan sekaligus merupakan bentuk pengetahuan yang masih sulit dijelaskan.

Konstruksi SI dalam Kacamata Teori Kritis

Seturut dengan pandangan Kress & Hodge (1979 diacu Titscher 2009: 236), sebagai bentuk wacana, konstruksi SI dalam konseptualisasi OND memiliki makna sosial di luar makna semantisnya. Meskipun bisa lebih kuat daripada makna semantisnya, hubungan makna sosial dengan linguistik tetap saling terkait.

Dalam kaitannya dengan struktur politik di masyarakat, suatu tujuan (di antaranya, *tercapainya kesepakatan*) dapat dicapai dengan konsep ideologi (Gramsci, *ibid*). Selanjutnya, ideologi (di antaranya, *hegemoni*) pada dasarnya termanifestasi dalam tanda-tanda linguistik (Demirovic 1992, dalam Titscher at al. 2009: 237). Hal itu tampak pada pemertahanan bentuk SI pada sejumlah konsep OND di atas. Pemertahanan itu terjadi, dapat karena disengaja maupun tidak disengaja. Keadaan itu secara nyata telah menghasilkan sebetuk kepatuhan yang juga anomalis. Disadari atau tidak, misteri itu adalah sebetuk gejala penghilangan makna linguistik untuk lebih mengutamakan bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough (1995).

Apabila dikaitkan secara historis dan intertekstualitas sebagaimana diajukan Wodak (1996 dalam Titscher 2009), pewacanaan konsep OND dalam bentuk SI dimungkinkan oleh pemikiran yang mengarah

kepada penempatan unsur sumber (S) sebagai identitas penguasa pada posisi awal konsep berhadapan langsung dengan kopula yang bersifat direksional dapat menjadi bentuk penghormatan kepada penguasa dalam relasi sosial yang bersifat administratif. Secara makroteks, pemikiran itu bisa dikorelasikan dengan wacana lain, misalnya teks sambutan pada acara tertentu (dengan urutan yang lazim, pihak yang terhormat selalu disebutkan lebih awal, diikuti oleh yang saya/kami hormati pada urutan selanjutnya) atau juga wacana struktur organisasi yang secara hierarki vertikal menempatkan kepala atau ketua pada posisi yang paling atas. Memang, ada bentuk paradigmatik di antara ketiga wacana itu. Tampaknya, upaya pengedepanan itulah yang menjadi salah satu corak pemertahanan kekuasaan, kehormatan dalam posisi, sebagai ideologi tertentu secara hierarki horizontal dalam OND. Namun, jika ideologi itu menjadi alasannya, tentu hal itu terjadi secara pragmatis dan parsial. Artinya, penerapan paradigma itu dalam bahasa konsep OND bukan sebagai keberterimaan yang umum kecuali ada kesepakatan yang masih dirahasiakan.

Sementara dari sudut pandangan Weber (dalam Goldblatt 2019: 166—181), kekakuan dan keanomalian yang pragmatis itu tampak terjadi sebagai akibat dari penghilangan kekuatan semantiknya. Penghilangan ini tersimpan jauh dalam pemikiran pihak yang terlibat di dalam OND sehingga menjadi pengetahuan yang kabur.

OND dengan Pola SI dalam Kacamata Makroteks

Ideologi, hegemoni, keterkosongan sebagaimana disebutkan pada bagian di atas, tampak secara historis diperkuat oleh wacana lain. Fenomena ini mirip dengan kasus perlakuan masyarakat terhadap salah satu naskah teks *Nitisarasamuccaya* yang diungkap oleh Uli Kozok (2002). Teks itu sebelumnya dipeluk erat sebagai sesuatu yang mistis dan bertuah. Naskah diperlakukan secara sakral dalam ritual adat tahunan. Oleh Kozok diketahuilah bahwa naskah itu hanya berisi teks peraturan atau undang-undang kerajaan Melayu pada abad ke-14 yang di antaranya mengatur bentuk sanksi dan denda atas suatu pelanggaran di antaranya pencurian. Teks itu kemudian dikenal dengan *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*. Pengungkapan itu telah menghadirkan kembali **pengetahuan** awal yang pernah terdiskontinuitas oleh waktu sehingga menjadi pengetahuan baru.

Intertekstualitas yang lain yang secara teoretis yang bercorak historis adalah catatan laporan perjalanan Muhamad Radjabⁱ dalam liputan perjalanan 1947—1948 di wilayah Sumatra (dalam hal ini termasuk Jambi). Dalam catatannya disebutkan,

“benar ada beberapa **pemuka** di antara mereka, tetapi yang sedikit ini tidak mempunyai perspektif yang terang, dan program kerja yang tertentu. Jika ada teori politiknya, Sebagian besarnya kabur dan kacau sebab diterimannya dari **tangan kedua** pula, yaitu penganjur yang tidak lebih pintar benar daripada mereka. Sebab itu, apa yang diterangkannya mengacaukan pikiran rakyat yang belum biasa dengan olahraga otak yang musykir; dan tidak dapat dibuktikan itu (Radjab 1949, 2020: 130).

Dalam kutipan catatan itu tampak bahwa tokoh (yang disebutnya sebagai *pemuka*) yang berperan sebagai konseptor (*penganjur*) kerap menerima teori tertentu, bukan dari sumber primer yang valid, melainkan sekunder (*tangan kedua*, dan mungkin juga sumber ketiga, dst.). Dengan demikian, di sana dimungkinkan terjadi distorsi makna dan simultan dari waktu ke waktu. Ini sejalan dengan amatan Fairclough (2013) atas gagasannya terhadap penyebab munculnya patologi sosial. Pada teks berikutnya, Radjab juga menambahkan bahwa

“tiap-tiap pegawai negeri dan jawatan ... menunaikan tugasnya sehari-hari seperti biasa dilakukannya semenjak dahulu. Mereka kebanyakan seperti juga terdapat di daerah (lainnya di Republik ini): belum meninggalkan sifat menuruti kebiasaan menunggu dan melakukan apa yang disuruh atasannya belaka... belum berbeda dari cara yang dan kesungguhannya di zaman Belanda dan di masa pendudukan Jepang... Mereka, pembesarnya juga tidak berani menjalankan tindakan baru yang dapat memajukan perekonomian ... dan belum sanggup mencari sendiri cara-cara baru... Kegemaran belajar juga kurang (Radjab *ibid*: 134)”.

Di samping adanya diskontinuitas, terdapat pula indikasi mengisyaratkan adanya perilaku yang berkelanjutan (menunggu dan melakukan yang disuruh atasan belaka, belum berani atau kurang berinisiatif) sampai pada era pengamatan bahkan juga sampai saat ini. Perilaku serupa juga dilihatnya di daerah lain. Keberlanjutan itu dibuktikan oleh keengganan dalam mengubah konstruksi konsep OND.

Demikianlah OND dalam realitasnya sebagai wacana terlihat menandai praktis sosial yang tidak seimbang. Dalam hal itu, terdapat identitas penguasa dalam struktur sosial yang dianggap harus dihormati juga dalam struktur gramatikal OND. Kehormatan itu ditekankan dalam posisi awal atau terdepan (ditandai oleh S dalam klausa tema Sumber) dalam konseptualisasi yang bersifat direksional. Namun,

sesungguhnya hal itu masih merupakan pengetahuan yang absurd. Keabsurdan itu juga menjadi keyakinan yang dikemas secara hegemonis sehingga lapis sosial yang di bawahnya tunduk dan tidak kuasa untuk mendekonstruksinya. Hegemoni itu diletakkan atas nama aturan hukum yang diyakini bersifat baku baik secara tata letak, maupun secara gramatika bahasa. Keadaan ini secara idesional memberikan pengetahuan dan secara interpersonal mengondisikan subjek-subjek sosial tertentu (Fairclough 1995b: 7) dalam kaitannya untuk mempertahankan identitas dan relasinya terhadap yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstruksi mikroteks atas data OND yang dijadikan objek dalam penelitian ini dapat dicermati dalam bandingan semantik dan pragmatik (sosial). Perbandingannya dapat diterakan dalam formulasi berikut ini.

- (3) OND = S + I
- (3a) OND = I + S
- (3b) OND \neq I + S

Konstruksi (3) dengan perubahannya menjadi konstruksi (3a) pada dasarnya dapat berterima secara semantik. Akan tetapi, perubahannya dengan konstruksi (3b) menjadi tidak berterima secara pragmatik. Karakteristik (3b) tampak merupakan bentuk ketidakseimbangan dengan cara mengabaikan konstruksi semantiknya sebagaimana pada (3a). Bagi Habermas penghilangan makna itulah yang terjadi untuk mempertahankan ideologi kekuasaan, meskipun juga menciptakan bentuk patologi baik secara pribadi maupun sosial. Bagi Fairclough hal itu termasuk sebagai gejala kemandulan rasionalitas akibat adanya unsur tertentu yang masuk ke dalam struktur organisasi; dan bagi Gramsci hal itu sebagai bentuk hegemoni kekuasaan.

Konstruksi wacana OND terhegemoni sedemikian rupa oleh sejumlah faktor dan dimotivasi oleh pengetahuan yang terdiskontinuitas dari bentuk tuturan (wacana) yang ideal. Selain itu, hegemoni terpelihara oleh perilaku sosial yang enggan untuk bertindak progresif. Perilaku dan pengetahuan lain pun ikut terkontinuitas. Akibatnya, hegemoni menjelma konvensi (Fairclough 1995:7) yang absurd. Hegemoni seperti itulah yang mendorong sulitnya untuk melakukan perubahan tertentu atas OND menuju bentuk tuturan yang dianggap ideal secara linguistik.

Secara pragmatik, hegemoni absurd itu dipeluk sebagai sesuatu yang baku bahkan oleh penguasa di tingkat daerah. Sengaja atau tidak sengaja, keadaan itu sekaligus menggambarkan ketidakseimbangan sosial dalam struktur pengetahuan konsep OND. Ketidakseimbangan dalam konteks relasi sosial yang terlihat di tingkat daerah direproduksi, serta dipertahankan sebagai alat penguasaan untuk menunjukkan kehormatan dalam hierarki social.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Wahyuddin. 2016. *Hegemoni Politik dalam Diskursus Pemilihan Kepala Daerah Sulsel* (Tesis). Program Studi Magister Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.
- Eades, D. 2001. "Discourse Analysis and the Law" dalam Mesthrie, Rajend. (2001). *Concise Encyclopedia of Sociolinguistics*. Amsterdam: Elsevier
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, Norman. 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Foucault, Michel. 2017. *Wacana Kuasa/Pengetahuan* (terjemahan). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometha.
- Goldblatt, David. 2019. *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh* (Terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Habermas, Jurgen. 1987a. *The Theory of Communication Action* ([Terjemahan] Volume 1: *Reason and The Rationality of Society*). Cambridge.
- Habermas, Jurgen. 1987b. *The Theory of Communication Action* ([Terjemahan] Volume 2: *Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*). Cambridge.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Kozok, Uli. 2002. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kress, Gunther dan Hodge, Bob. 1979. *Langue as Ideology*. London: Routledge.

- Magnis-Suseno, Franz 2005. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mesthrie, Rajend. 2001. *Concise Encyclopedia of Sociolinguistics*. Amsterdam: Elsevier.
- Radjab, Muhamad. 2020. *Catatan di Sumatra*. Jakarta: Balai Pustaka & Kepustakaan Populer Gramedia.
- Renkema, Jan. 2004. *Introduction to Discourse Studies*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ke-2). Jakarta: Balai Pustaka.
- Titscher, Stefan. at al. 2019. *Metode Analisis Teks dan Wacana* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Natal P. Sitanggang
Institusi : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pendidikan : S-2 Linguistik
Minat Penelitian: Analisis Wacana

ⁱ Radjab adalah wartawan Kantor Berita Antara yang ikut menjadi tim Kementerian Penerangan Pemerintah Republik Indonesia. Mereka melakukan peninjauan keadaan masyarakat di Sumatra (termasuk di Jambi) pada tahun 1947.